

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama proses pendidikan, peserta didik mendapat bekal dari pengasuh dalam berbagai ketrampilan fungsional dan ilmu pengetahuan. Dengan ini dikemas melalui kurikulum sekolah sebagai acuan secara maksimal. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1, bahwa :

“Pendidikan ialah suatu usaha terencana dan sadar dalam mewujudkan kondisi selama pembelajaran supaya peserta didik dengan aktif dalam mengembangkan potensi pada dirinya agar peserta didik mempunyai kekuatan dalam *spiritual* keagamaan, kecerdasan, kepribadian dan ketrampilan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.”

Hasil penelitian berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP) bahwa tingkat pendidikan Tahun 2016, menunjukkan Indonesia ke 60 dari 61 negara mengenai minat baca dengan hasil 14,6 persen. Hal ini Indonesia memiliki minat baca yang rendah, daya saing bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan dibandingkan dengan negara lain, dan menunjukkan Indonesia lepas dari krisis literasi. Hambatan yang dihadapi ialah ketersediaan buku belum memadai, rendahnya minat baca, dan pemerintah kurang dalam memotivasi pada kalangan peserta didik.

Berdasarkan data UNESCO (dalam Baswedan, 2014) bahwa indeks minat baca di Indonesia tahun 2012 hanya memperoleh 0,001. Badan

Penelitian Dan Pengembangan Kemendikbud, menyebutkan kapasitas dalam membaca pada usia 15 tahun hanya mencapai 37,6% tanpa bisa menangkap makna. Di Vietnam mampu menghasilkan 15.000 buku setiap tahun, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan 8.000 buku setiap tahun.

Permasalahan secara umum pada dunia literasi di Indonesia yaitu kurangnya akan sumber informasi, contohnya dalam kegiatan membaca dan buku bacaan. Sehubungan adanya buku yaitu sebagai sumber informasi, gairah, dan pola berfikir masyarakat Indonesia masih kuatnya menggunakan tradisi lisan dalam kehidupan sosial sehingga hal ini merupakan akar penghambat masalah tersebut. Sedangkan pada era teknologi informasi, peserta didik diupayakan untuk mempunyai kemampuan membaca dengan artian mencerna teks secara kritis, reflektif, dan analitis. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan guru (pihak sekolah). Orang tua memiliki peran penting terlibat dalam memahami anak, sehingga pihak sekolah mengerti apa yang perlu dilakukan sebagai program literasi sekolah.

Literasi harus didekolonisasi agar martabat manusia yang tercermin dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal mendapatkan pengakuannya sebagai bagian dari modernisasi satu bangsa (Hernandez-Zamora dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:122). Dalam konteks Indonesia, literasi ini relevan karena taraf kehidupan individu juga ditentukan oleh juga kebijakan ekonomi oleh juga kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan yang berkeadilan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), Gerakan Literasi Sekolah merupakan usaha untuk mewujudkan sekolah sebagai lembaga proses pendidikan secara berkelanjutan dan menyeluruh melalui pelibatan publik. Artinya sekolah yang mampu membuat siswa semangat ingin tahu, berkomunikasi dengan baik dan dapat berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan program pendidikan yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Program ini dilatarbelakangi karena rendahnya keterampilan literasi yang membuktikan bahwa proses pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan. Menurut Sutrianto dkk (dalam Kurniawan dkk, 2017), Mendikbud memiliki alasan yang kuat dalam menelurkan program ini, bahwa uji literasi membaca dari hasil survei internasional *Progress International Reading Literacy Study* (PIRLS) 2011, Indonesia menempati ranking 45 dan mendapat nilai 428. Sedangkan uji literasi membaca dalam *Program Internationale for Student Assesment* (PISA) 2009 menyatakan bahwa di Indonesia menempati peringkat 57 dari 65 negara. Dan pada tahun 2012 mengungkapkan peserta didik Indonesia berada ranking 64 (urutan kedua dari bawah) dengan nilai 396. Kemudian pada PISA 2015, posisi naik enam peringkat menjadi urutan ke 64 dari 72 negara. Ketertinggalan ini menyentak kita tentang kecakapan literasi yang menjadi tolak ukur pada pendidikan kontemporer.

Istilah dengan kata ‘pendidikan’ atau ‘pengetahuan’ berganti baju menjadi literasi. Banyak istilah literasi lain, seperti literasi keselamatan jalan, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan, literasi moral untuk melengkapi konsep literasi informasi yang terlebih dulu digemakan UNESCO tahun 2003.

Gerakan Literasi Sekolah dikemukakan sejak tahun 2015 berdasarkan dari agenda prioritas (Nawacita) sesuai fungsi dan tugas dari Kementerian Pendidikan dibawah menteri Anies Baswedan yang dilanjutkan oleh menteri selanjutnya. Butir nawacita yang sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu butir nomor 5, 6, 8, dan 9. Yang dikmaksud dengan butir nawacita tersebut yaitu (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), Gerakan Literasi Sekolah memiliki tujuan khusus yaitu meningkatkan budaya dalam literasi membaca dan menulis, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang mampu menjaga keberlanjutan, mengelola pengetahuan, mengadakan berbagai macam buku dan strategi dalam membaca, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan sekolah agar literat. Menurut Antasari (2016:179), bahwa lingkungan pendidikan yang

di dapat pertama kali melalui lingkungan keluarga, karena orang tua memiliki peran besar dalam mendidik anak-anaknya untuk membiasakan dan memiliki minat membaca.

Membaca merupakan suatu kegiatan sangat penting sebagai memajukan setiap individu manusia ataupun generasi penerus bangsa. Adanya membaca, peserta didik dapat menambah pengetahuan serta wawasan. Minat baca diperoleh dari proses pembelajaran yang dikembangkan melalui kegiatan keseharian, diwujudkan dari kebiasaan yang ditanamkan melalui lingkungan sejak dini.

Menurut David Efendi yang disampaikan pada workshop literasi, menyatakan agar bangsa ini tidak terlalu gampang menjadi korban informasi abal-abal atau hoax, literasi haruslah didorong untuk menumbuhkan daya kreatif, daya tahan, dan daya saing bangsa Indonesia. Makna literasi yang mengarah pada upaya sungguh-sungguh untuk menentukan takdir sendiri. Selain Gerakan Literasi Sekolah juga ada gerakan literasi keluarga dan gerakan literasi masyarakat.

Menurut Hernandez (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:80) literasi berfungsi memberikan seseorang 'kewenangan' untuk menjadi aktor utama bagi hidupnya sendiri, berani bersuara untuk diri sendiri dan untuk komunitas di mana dia berada.

Zaman sekarang teknologi lebih dipilih sebagai untuk mendapatkan sumber informasi. Perubahan dari serangan teknologi macam alat komunikasi (*gadget*) dan popularitas media yang menampilkan teks

berbagai bentuk yang menarik. Masyarakat pada umumnya dituntut agar dapat beradaptasi adanya keterbaruan atau kemajuan teknologi.

Riset dalam Mursyid dan Kalida (2014:132), di era serba teknologi ini, informasi sangat mudah untuk didapatkan. Dalam hitungan menit, bahkan detik informasi sudah dapat dalam genggam. Kehadiran teknologi informasi tentu memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, keberadaan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif. Misalnya, anak-anak lebih akrab dengan game online dan *Play Station* dibandingkan dengan permainan tradisional. Akhirnya, banyak yang sering mengabaikan tugas utamanya, yaitu belajar.

Dalam dunia yang semakin tanpa batas, di mana internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, makna dari literasi juga bergeser, dari literasi 'hanya membaca' menjadi literasi 'baca-tulis'. Tulisan bukan sekedar representasi diri, namun juga mampu mengubah identitas seseorang. Hartley (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:82) mengatakan dalam dunia digital, setiap pengguna sekaligus adalah pencipta, dan dengan demikian konsumsi media menjadi modal literasi, di mana baik pencipta maupun pengguna bisa terlibat dalam interaksi yang menempatkan mereka sebagai sosok yang setara.

Saat ini kebutuhan literasi menuntut pemerintah untuk memfasilitasi dan menyediakan pelayanan sistem pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31, menyatakan program literasi meliputi cara untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial,

spiritual, bahasa, emosi, dan estetika. Hal ini berguna bagi masyarakat dan bangsa yaitu:

1. Mencerdaskan bangsa, unggul dan kompetitif.
2. Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah.
3. Meningkatkan kemampuan dari lingkungan pendidikan supaya literat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong masyarakat dalam hasrat membaca buku khususnya pada pelajar. Hal ini pemerintah melakukan terobosan dengan meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Upaya yang dilakukan bagi peserta didik untuk menangani rendahnya minat baca di Indonesia dengan mengembangkan gerakan literasi sekolah. Pada kegiatan Gerakan Literasi Sekolah menerapkan kebiasaan 15 menit untuk membaca buku non pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan membaca dan menumbuhkan tingkat minat baca. Terobosan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada bidang pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, tingkat pusat, dan satuan pendidikan yaitu sekolah. Dorongan dalam keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah dengan melibatkan orang tua peserta didik dan *Stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat, karyawan, pemerintah, dan lainnya.

Perpustakaan atau sekolah memiliki peran penting sebagai wadah proses pembelajaran dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan

mengadakan kegiatan mengenai gerakan literasi sekolah. Anggapan mengenai Gerakan Literasi Sekolah tidak sepenuhnya membantu dalam mengembangkan atau meningkatkan budaya literasi peserta didik. Kondisi tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan pada sekolah tidak sama. Hal ini dapat diatasi jika sekolah melakukan kegiatan yang mendukung dalam membentuk peserta didik mempunyai pandangan dan wawasan luas, seperti menumbuhkembangkan kegiatan literasi sekolah. Maka, pemberdayaan perpustakaan perlu terus ditingkatkan dengan segala cara, tindakan, upaya dan dorongan dari berbagai pihak masyarakat untuk meningkatkan minat baca sehingga benar-benar menjadi pelajar secara substansial.

Upaya yang dilakukan tidak hanya mengandalkan sebuah tinta hitam diatas kertas putih, melainkan dilakukan secara gerakan nyata. Dalam menumbuhkan minat baca bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama. Pendukung pemberdayaan minat baca dapat didukung dan melalui kerja sama dari lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lembaga yang berkaitan.

Awal mula dalam minat baca yaitu dengan menyediakan buku yang menarik sehingga peserta didik mempunyai rasa ingin untuk membaca buku terus menerus dan membentuk rasa kebiasaan untuk membaca buku. Setelah tertanam kebiasaan dalam membaca, dari kebiasaan membaca individu kemudian akan berkembang menjadi budaya membaca.

Riset ini menarik karena beberapa hal. *Pertama*, berdasarkan data Bappeda Provinsi DI Yogyakarta tahun 2015 dari melek huruf menunjukkan nilai 98,8%, tetapi banyak pandangan melihat bahwa masih rendahnya minat baca pada kalangan pelajar dengan masih sedikitnya kunjungan di perpustakaan. Pengaruh alat komunikasi (*gadget*) menjadi penghambat dalam kegiatan literasi minat baca buku sehingga menjadikan program Gerakan Literasi Sekolah diadakan di Kabupaten Sleman.

Kedua, minat Gerakan Literasi Sekolah dilihat dari letak geografis wilayah Kabupaten Sleman memiliki potensi untuk terus meningkatkan minat baca. Hal ini dapat didukung adanya perpustakaan, perbukuan, dan pendidikan. Karena lembaga pendidikan, toko buku, perpustakaan, bahkan Universitas besar berada pada wilayah Kabupaten Sleman, tetapi belum ideal dalam pencapaiannya. Fasilitas yang diberikan juga dapat meningkatkan minat baca peserta didik seperti halnya koleksi buku berbagai macam kategori dan pelayanan yang memuaskan, serta menciptakan inovasi yang sekiranya dapat menarik peserta didik untuk minat baca.

Faktor-faktor yang mengakibatkan menurunnya tingkat belajar yaitu rendahnya minat baca buku. Budaya gemar membaca menjadi sangat biasa jika sejak masa anak-anak sudah diakrabkan dengan buku-buku bacaan. Hal ini dikaitkan dengan budaya gemar membaca yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat saat ini. Sekolah memiliki peran penting menumbuhkan minat baca siswa-siswinya dan untuk mendekatkan

mereka pada perpustakaan, sehingga di Kabupaten Sleman mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan Gerakan Literasi Sekolah. Maka hal itu Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung penuh dalam upaya memajukan perpustakaan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dengan mengadakan sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi pada peserta didik.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah berdasarkan data bahwa di Kabupaten Sleman memiliki nilai melek huruf yang tinggi yaitu 98,8%. Hal ini yang menjadi menarik dengan semakin banyaknya melek huruf bagaimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan baru dengan upaya yang strategis dalam memicu agar peserta didik lebih senang membaca dan membaca sebagai kebutuhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017?
2. Bagaimana Memetakan Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian, taraf ilmiah yang menumpulkan fakta-fakta atau prinsip untuk mencapai kepastian suatu masalah.

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017.
- b. Untuk dapat memetakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi penyelenggara pemerintahan (Dinas Pendidikan) dalam pelaksanaan program.
- c. Secara akademis, dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa yang melakukan penelitian serupa dengan tema atau masalah.

1.4 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ranti Wulandari (2017)	Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al Hakim Internasional	Hasil penelitian ini dalam implementasi kebijakan gerakan literasi sekolah yaitu (1). Bahwa program yang menunjang kebijakan gerakan literasi di SDIT LHI adalah: <i>Reading Group, Morning Motivation, Mini library, Pengadaan perpustakaan, Best Reader of The Month, Books Lover, Oktober bulan bahasa, World book day, Waqaf buku, Story Telling, Mading, Library class</i> ; (2). implementasi kebijakan ini kemudian didukung oleh a). Komunikasi agen-agen pelaksana melalui rapat elemen sekolah seperti manajemen, orangtua, dan guru; b). Sumber daya yang mendukung kegiatan ini seperti adanya potensi guru, dana dari orangtua, sekolah, dan pemerintah serta sponsor; c). Komitmen dari para agen pelaksana; d). Struktur birokrasi baik dari pihak sekolah; (3). Faktor pendukung berupa tersedianya sarana untuk mensosialisasikan kebijakan, hibah buku dari orangtua, waktu dan dana, guru-guru mempunyai semangat belajar, mahasiswa PPL juga membantu dalam pelaksanaan program-program perpustakaan, serta semua warga sekolah terlibat aktif dalam program yang dibuat sekolah.
2.	Kurniawan, Sriasih dan	Implementasi Program Gerakan	Hasil penelitian ini menunjukkan SMA Negeri 1 Singaraja mampu

	Nurjaya (2017)	Literasi Sekolah (GLS) di SMA Negeri 1 Singaraja	melaksanakan 20 indikator dari 26 indikator kinerja pencapaian fokus kegiatan dalam pengembangan literasi di sekolah. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan program GLS SMA Negeri 1 Singaraja, di antaranya keluhan terhadap jam masuk dan pulang sekolah akibat literasi, kurangnya pendanaan kegiatan literasi, seringnya tersitanya jam pembelajaran pertama, dan lain sebagainya. Manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan GLS SMA Negeri 1 Singaraja, yakni di antaranya siswa aktif dalam menghasilkan karya tulis, terciptanya kebiasaan membaca di kalangan siswa, fasilitas pendukung literasi sangat membantu guru dan siswa, dan lain sebagainya.
3.	M. Anas Fanani (2017)	Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah Di SMP Negeri 2 Trimurjo Tahun Ajaran 2016/2017	Hasil penelitian ini bahwa faktor penghambat pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 2 Trimurjo terdiri dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ketersediaan dana bahwa 35 responden atau 66% masuk dalam kategori kurang mendukung, sedangkan faktor eksternal yaitu daya dukung pemerintah dimana 27 responden atau 51% masuk dalam kategori kurang mendukung.
4.	Al-Mutmainnah, Wahidah, Pantiwati Dan Purwanti (2017)	Analisis penerapan gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 1 Batu	Hasil dalam penelitian tersebut sudah melaksanakan 3 tahap dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Sekolah, yaitu (1) tahap pembiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai; (2)

			tahap pengembangan menulis jurnal berisi tanggapan mengenai buku yang telah dibaca oleh siswa; (3) tahap strategi pembelajaran menggunakan <i>Deversifikasi</i> (perbedaan) yaitu dengan memanfaatkan fasilitas dan lingkungan sekolah agar siswa lebih antusias dalam meningkatkan minat baca.
5.	Hery Pratomo (2017)	Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah	Hasil penelitian dari Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam Gerakan Literasi Sekolah yaitu: a) pengembangan area membaca; (b) kampanye program melalui papan pengumuman, poster dan lainnya; (c) penyediaan buku-buku; (d) pengembangan perpustakaan; dan (e) pengembangan program kegiatan sekolah bertema literasi.

1.5 Kerangka Teori

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah suatu perangkat tingkat yang diharapkan dapat dimiliki seseorang yang berkedudukan didalam masyarakat. Sedangkan menurut Jack dan Helena (dalam Saputra, 2015:10) mengatakan peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Selain itu, Poerwodarminta (1995:34) menyatakan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut :

- a. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara;
- b. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan;
- c. Dan peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara.

Kemudian menurut Soekamto (1987:52), pengertian peran (*role*) merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka bisa disebut telah melaksanakan suatu peran. Sementara teori menurut Koentjaraningrat (1989:22), peran adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.

2. *Stakeholder*

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelibatan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) secara kolaboratif dalam konteks perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan literasi menjadi sangat penting. Melalui model *stakeholder collaborative governance* dapat diidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan, selain pemerintah dalam kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan mulai dari tingkat pusat sampai desa. Selain itu akan diperoleh kejelasan peran maupun pola relasi yang setara dan otonom, saling

berbagai manfaat dan resiko, serta penggabungan sumber daya dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang (Dwiyanto, 2012:250). Melalui pengelolaan berbasis *stakeholder collaborative governance* juga memungkinkan dilakukannya *share vision* dan mewujudkannya bersama-sama, partisipasi tinggi dari seluruh unsur terkait, adanya jejaring (*networking*) luas dan kemitraan (*partnership*) yang kuat serta bersifat sinergis menurut Fosler dan Munro (dalam Dwiyanto, 2012:253).

Kemudian Hummels (dalam Hadi, 2011:103) mengatakan *stakeholder are individuals and groups who have legitimate in the decision making process simply because they are affected by the organization's practices, politices, and actions*. *Stakeholder* memiliki beberapa fungsi yang saling berinteraksi yaitu *state* (negara atau pemerintah), *society* (masyarakat), dan *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha).

Selain itu, Subarsono (2016: 174), mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun

masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Subarsono, 2016: 175), mendefinisikan:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Artinya pemerintah secara langsung melibatkan pemangku kepentingan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten

Sesuai Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki perangkat daerah yang dibagi menjadi berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling berkoordinasi sebagai pelaksana fungsi eksekutif. Sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga yang ditempatkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menyatakan bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang pendidikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendidikan;
 2. Pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
 3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 4. Pengembangan dan pembinaan pendidikan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Gerakan Literasi Sekolah

Berdasarkan UNESCO (2003), literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat, literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait mengenai pengetahuan, budaya dan bahasa.

Literasi adalah kegiatan pengelolaan pengetahuan yang memberdayakan siswa dan memampukan mereka untuk dapat

berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi (Freire dan Giroux dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:122).

Hernandez (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:80) mengatakan literasi adalah praktik sosial, dimana literasi berperan penting untuk memecah kebisuan tokoh dan keberanian untuk memperjuangkan diri sendiri. Street (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:122) mendefinisikan kecakapan literasi fungsional sebagai ketrampilan sederhana yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat dalam perannya sehari-hari.

Teori Bourdieu (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:144) pakar sosiologi dari Prancis, kemampuan literasi adalah salah satu contoh kapital budaya yang bisa menjadi alat untuk mengimprovisasi habitus.

Adapun teori hubungan antara peristiwa literasi dan praktik literasi yang dikemukakan oleh Barton dan Hamilton (dalam Dewayani & Retnaningdyah, 2017:11) yaitu praktik literasi lebih abstrak, karena melibatkan nilai, sikap, perasaan, dan hubungan sosial, sedangkan peristiwa literasi merupakan komponen dari praktik sosial tersebut yang bisa dilihat dan diamati.

Sedangkan teori perkembangan literasi menurut Mc Garry (dalam Dewayani dan Retnaningdyah, 2017:2) yaitu perkembangan perpustakaan dan literasi pada abad ke-18 dikenal sebagai zaman pencerahan yang saat

itu identik dengan tradisi masyarakat untuk mempelajari pengetahuan melalui kegiatan membaca dan menulis.

Kern (dalam Wulandari, 2017), menyatakan mendefinisikan literasi adalah :

“Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturallysituated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge.”

Artinya literasi merupakan hal yang sangat vital sebagai penggunaan praktek sosial, historis, dan budaya untuk menciptakan dan menafsirkan makna sebuah tulisan. Literasi juga menjadi bekal bagi kehidupan bangsa dan negara.

Lalu definisi Gerakan Literasi Sekolah sendiri menurut Kemendikbud dalam Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah, secara umum :

“Menumbuhkembangkan melalui pembudayaan literasi sekolah dalam budi pekerti peserta didik supaya mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah.”

1.6 Definisi Konseptual

1. Peran

Peran adalah suatu tindakan seseorang/lembaga dalam melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan berbagai posisi dan

menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan peran yang dilakukan.

2. *Stakeholder*

Stakeholder adalah keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten

Unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan literasi sekolah adalah usaha lembaga pendidikan guna untuk mewujudkan sekolah sebagai warga literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

1.7 Definisi Operasional

Penelitian terhadap Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah ini memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah
 - a. Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah

- b. Strategi Program Gerakan Literasi Sekolah
 - c. Peningkatan dalam Minat Baca Peserta Didik
 - d. Kebijakan
2. Memetakan Kerjasama Antara Dinas Pendidikan dengan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah
- a. Peningkatan Kunjungan Perpustakaan
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
 - c. Penyediaan Fasilitas Membaca

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah peneliti yang tertuju untuk memecahkan masalah yang ada saat ini atau memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual, data-data yang dikumpulkan disusun, kemudian dianalisis.

Selain itu priset dituntut untuk menunjukkan sikap yang objektif, fleksibel dan tidak cenderung mengadili. Pokok-pokok dari wawancara biasanya terdiri dari tiga tema yaitu sistem nilai, tingkah laku, dan perasaan objek penelitian.

Menurut Salim (2006: 40) konsep penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses, berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur. Di dalam menghadapi fenomena yang diukur atau diteliti tidaklah secara ketat, melainkan lebih bersifat realita yang dibangun

antara periset dengan apa yang dipelajari. Dengan hal ini, dalam metode penelitian ini lebih mengutamakan atas hal yang benar-benar terjadi secara nyata.

Peneliti berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang objek atau kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan sebuah studi literatur. Kemudian, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif yang melibatkan berbagai metode dalam menelaahnya. Dalam penelitian ini terkait adanya perubahan kondisi dari waktu ke waktu yang menarik untuk digali secara terus menerus karena selalu mengalami perkembangan pemahaman.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan akan membangun sebuah karya yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, namun hal ini hanya bersifat sebagai usaha mengetahui dan mempelajari keadaan yang terjadi di sekitar. Dan harapan dari adanya penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan informan.

Dengan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis sehingga bertujuan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menginpresentasikan secara jelas dan utuh tentang bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten

Sleman dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2017.

1.8.2 Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dinas yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan beberapa sekolah serta *Stakeholder* lainnya dan masyarakat di Kabupaten Sleman. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara yang ditujukan kepada narasumber yang bersangkutan dari instansi terkait dan sumber-sumber yang relevan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007:62).

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan data primer dan data sekunder, maka ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2007:72), adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Atau menurut Prastowo (2016:212), pengertian

wawancara adalah suatu metode penumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan wawancara menurut Fajar & Achmad (2015:161), adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yang memerlukan administrasi dari suatu jadwal oleh seorang pewawancara. Bertujuan untuk memberikan secara pasti sesuai dengan pertanyaan.

2. Observasi

Observasi menurut Fajar dan Achmad (2015:167), adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan mengamati fenomena dengan menggunakan beberapa catetan berupa daftar pertanyaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Selain itu menurut Ghony (2016:165), metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian untuk memerlukan data yang diperlukan. Observasi ini untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program Gerakan Literasi Sekolah Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2007: 74), adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Secara khusus, untuk penelitian kualitatif dan sejarah, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data. Lalu menurut Prastowo (2016: 227), dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film, yang isinya adalah peristiwa telah berlalu. Jadi, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa lalu.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang tersedia. Dokumen ini berupa dokumen resmi, artikel, jurnal, arsip, biografi, dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari data yang telah ada untuk dianalisis dengan sumber lain yang diperoleh baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

4. Kuesioner

Kuesioner menurut Sugiyono (2007:76), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden dan beberapa pertanyaan tersebut harus dijawab oleh responden.

Lalu menurut Fajar dan Achmad (2015:164), kuesioner adalah pengumpulan data dengan membagikan sebuah lembaran berupa pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Pengumpulan data ini untuk memperoleh informasi yang akurat dan detail.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi daftar pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh responden. Teknik ini terdiri dari tiga bagian yaitu judul kuesioner, pengantar yang berisi tujuan atau petunjuk pengisian, dan item pertanyaan. Responden untuk diajukan kuesioner adalah sekolah atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah Condongcatur, SD Model Sleman, SMP Negeri 4 Pakem, dan SMP Budi Mulia Dua.

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mempermudah seseorang untuk memahami dan membaca apa yang ditulis dari peneliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian.

Hal ini dilakukan untuk penelitian jenis kualitatif menurut Hubberman dan Miles (dalam Prastowo, 2016: 242) yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Deskripsi Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan intisari dari proses analisis yang memberikan pernyataan mengenai temuan-temuan utama pokok. Mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.